

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENJAGA KAMTIBMAS DI KAMPUNG PESILAT KABUPATEN BOJONEGORO**

**Rima Diah Andayani<sup>1</sup>, Muhammad Miftahul Huda<sup>2\*</sup>, Ahmad Taufiq<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno, No.2, Kec, Bojonegoro

miftahjatim@gmail.com

### **Abstract :**

Pencak Silat is a traditional martial art originating from Indonesia. Including martial arts that are members of the Bojonegoro Village of Pesilat There are 13 pencak silat organizations that are members of the BKP including PSH Terate, PSH Winongo, PBD Rajekwesi. Bojonegoro is often involved in conflicts, causing material losses and causing casualties. Based on the background above, the focus set by the researchers is "Collaborative Governance in maintaining Public Safety and Order in the Martial Fighter villages in Bojonegoro Regency). This study aims to find out how to deal with conflicts between martial arts community in Bojonegoro Regency. This research is a research that uses qualitative methods with a descriptive type of research. The subject of this research is focused on members of the Pencak Silat Institution who are members of the Bojonegoro Martial Fighter Village in Bojonegoro Regency. The technique of selecting informants is purposive sampling. In collecting data, by observation, interview , and documents. Based on the research results it is known that the conflict between Pencak Silat community is an act of unscrupulous members of the Silat Institution who act on behalf of the institution and involve a group of community. The nature of competition and mutual existence among members of these community causes conflict between community, so that trivial problems can trigger big conflict. This internal community conflict not only caused losses to the members of the community involved, but also brought losses to the Silat Institution.

### **Abstrak :**

Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Setiap daerah memiliki berbagai aliran bela diri pencak silat. Termasuk seni bela diri yang tergabung dalam Bojonegoro Kampung Pesilat Ada 13 organisasi pencak silat yang tergabung dalam BKP diantaranya PSH Terate, PSH Winongo, PBD Rajekwesi, Margaluyu 151, Persinas Asad, PSNU Pagar Nusa, Tapak Suci, IKPSI Kera Sakti, Pencak Organisasi, Merpati Putih, Gubuk Remaja, Perisai Diri, dan Rasa. Bojonegoro ini sering terlibat konflik sehingga menimbulkan kerugian dari segi materi hingga menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus yang ditetapkan oleh peneliti adalah "*Collaborative Governance* dalam menjaga Kamtibmas di Wilayah Polres Bojonegoro (Studi Kasus : kampung pesilat di Kabupaten Bojonegoro". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengatasi konflik antar perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan purposive. Dalam melakukan pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa konflik antar perguruan pencak silat merupakan tindakan dari oknum anggota perguruan silat yang mengatasnamakan perguruan dan melibatkan kelompok perguruan. Sifat kompetisi dan saling eksistensi yang dimiliki antar anggota perguruan ini menimbulkan konflik antar perguruan, sehingga permasalahan sepele bisa memicu konflik yang menjadi besar. Konflik antar perguruan ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi anggota perguruan yang terlibat, tetapi juga membawa kerugian bagi Perguruan Silat.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Konflik, Pencak Silat, Kampung Pesilat

## PENDAHULUAN

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pencak Silat adalah bela diri tradisional Indonesia yang berakar dari budaya Melayu, Dan ditemukan diseluruh wilayah Indonesia (Gunawan, 2007). Pencak silat tumbuh dan berkembang dari zaman penjajahan sampai turun temurun dengan proses yang sangat panjang sampai ke generasi selanjutnya (Wahyu, dalam Zakaria M).

Bela diri dalam pencak silat mempunyai dua makna yaitu seni dan pembelaan diri. Seni di dalam pencak silat lebih mengutamakan pada keindahan, pola gerak, dan lebih diartikan sebagai seni persembahan pencak silat. Pembelaan dalam pencak silat disebut sebagai serang bela dan bagaimana upaya melindungi diri dari lawan (Orchid, dalam Zakaria M).

Deklarasi Kampung Pesilat ini digagas oleh Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro SH SIK MSI dan disaksikan oleh jajaran forum pimpinan daerah (Forpimda) Bojonegoro dan membentuk suatu proses *collaborative* berupa rapat rutin yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Ada 13 organisasi pencak silat yang tergabung dalam BKP diantaranya PSH Terate, PSH Winongo, PBD Rajekwesi, Margaluyu 151, Persinas Asad, PSNU Pagar Nusa, Tapak Suci, IKPSI Kera Sakti, Pencak Organisasi, Merpati Putih, Gubuk Remaja, Perisai Diri, dan Rasa.

Keberadaan perguruan pencak silat sebagai kebudayaan yang perlu dilestarikan dan diwariskan secara turun temurun. Pencak silat mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan dibuktikan banyaknya perguruan pencak silat. Namun, semakin banyaknya perguruan pencak silat juga beriringan dengan banyaknya konflik yang timbul antar perguruan pencak silat.

Salah satu kasus pengeroyokan secara berkelompok yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro oleh anggota Perguruan Pencak Silat sebagai berikut : Terjadi kasus pengeroyokan pada tanggal 25 Juli 2021 di Desa Sembung Kecamatan Kapas kabupaten Bojonegoro dengan LP : B/15/VII/2021/RESKRIM/SPKTPOLSEK KAPAS/POLRES

Bojonegoro/ Polda Jatim, dalam kronologi tersebut menjelaskan bahwa kasus pengeroyokan telah memakan satu korban bernama FP umur 22 tahun alamat Desa Kapas Kec Kapas Kab Bojonegoro dengan dua pelaku tersangka EB umur 25 Tahun Desa Banjarsari Kec Trucuk Kab Bojonegoro dan AE (nama samaran) 25 tahun Desa Karangpacar Kec Kota Kab Bojonegoro. (Sumber Polres Bojonegoro 2022).

Berdasarkan data laporan yang diperoleh dari Polres Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

Jumlah Konflik antar Perguruan Pencak Silat di Kabupaten Bojonegoro tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Kasus
2019	20
2020	17
2021	14

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pada konflik antar perguruan pencak silat di kabupaten Bojonegoro. Jenis tindakan yang dilakukan juga variatif, mulai dari tindakan kekerasan seperti pengeroyokan, pengerusakan, penganiyaan, pelemparan dll.

Tindakan kekerasan yang paling banyak dilakukan berdasarkan data yang dimiliki oleh Polres Bojonegoro yaitu tindakan pengeroyokan secara berkelompok atau dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pengeroyokan sebagai tindakan melanggar hukum yang dijelaskan pada pasal 170 KUHP yaitu : Siapa pun secara nyata serta bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang lain atau barang dan dihukum dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digali informasi yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* Dalam Menjaga KAMTIBMAS Di Kampung Pesilat Kabupaten Bojonegoro.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Untuk mendeskripsikan sejumlah indikator yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* Dalam Menjaga Kamtibmas Di Wilayah Polres Bojonegoro (Studi Kasus : Kampung Pesilat di Kabupaten Bojonegoro) secara terperinci.

Fokus penelitian ini adalah *Collaborative Governance* dimana mengacu pada model kolaborasi Ansell dan Gash menjelaskan dengan rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersiklus yang terdiri dari 4 variabel yaitu Kondisi Awal, Kepemimpinan Fasilitatif, Desain Kelembagaan, Proses Kolaboratif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data akan dilakukan dengan teknik analisis Miles dan Huberman. Analisa dilakukan dengan 3 langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Karena informan akan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kondisi Awal**

Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para stakeholder memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing stakeholders, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan.

Pada tahap ini membicarakan tentang rencana terbentuknya Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dan proses terbentuknya Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP). Yang mana rencana dan proses terbentuknya di dasari adanya sering terjadi persoalan-persoalan, perkelahian, gesekan atau konflik antar perguruan pencak silat yang ujungnya akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Oleh karena itu Kapolres Bojonegoro mempunyai inisiatif untuk membentuk suatu wadah Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) untuk menggandeng seluruh kelompok perguruan pencak silat yang ada di Bojonegoro dan membuat rukun antar perguruan silat yang dulu sempat diisukan sering terjadi perkelahian antar kelompok perguruan Pencak Silat.

Pembentukan pengurus Bojonegoro Kampung Pesilat telah dilaksanakan hingga ke tingkat Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Mengacu pada kolaborasi dengan pendekatan Penta Helix Bojonegoro Kampung Pesilat belum bisa dikatakan sebagai sebuah kolaborasi sempurna, karena hanya melibatkan aktor-aktor yang memang terikat dengan pemerintahan. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menyatakan bahwa keterlibatan dari Pihak Pemerintah, Masyarakat, dan Media massa.

### **2. Desain Kelembagaan**

Pemimpin meminta para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam negosiasi titik baik dan mengeksplorasi, kompromi dan perolehan bersama. *Collaborative*

governance sebagai konsensus yang berorientasi meskipun menunjukkan bahwa konsensus tidak selalu tercapai. Masalahnya di sini apakah semua kolaboratif harus memerlukan konsensus. Masalah desain kelembagaan penggunaan tenggang waktu melemah merupakan sifat berkelanjutan kolaborasi secara tidak sengaja mengurangi insentif kerjasama jangka panjang. Desain kelembagaan merupakan salah satu tahap dalam proses Collaborative Governance, yaitu membahas tentang tata cara dan peraturan dasar suatu kolaborasi. Seperti prosedural kolaborasi yang bersifat legal, transparan, serta inklusivitas partisipan.

Adapun tata cara dalam penyelesaian suatu masalah disetiap kepemimpinan Kapolres Bojonegoro membentuk Paguyuban BKP yang bertujuan untuk menyatukan Perguruan Pencak Silat yang ada di Kab. Bojonegoro dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan untuk membentuk Paguyuban BKP. Melakukan kegiatan Deklarasi dan Ikrar Paguyuban Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dan Melaksanakan kegiatan Apel Besar Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) yang berlangsung di alun-alun Bojonegoro.

Desain kelembagaan juga dibuktikan dengan adanya struktur organisasi dalam BKP ini, seperti yang tertera pada tabel berikut :

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR
1	Wahyu Subagdiono	Ketua Umum
2	Imam Muhtasom	Wakil Ketua
3	Budiyanto	Wakil Ketua
4	Arif Nanang	Wakil Ketua
5	Sasmito Anggoro	Sekretaris
6	Nur Rohman	Bendahara
7	Ardhian Orianto	Bidang Organisasi
8	Ahmad Su'udi	Bidang Organisasi
9	Imam Sutaji	Bidang Organisasi
10	Kusmadi	Bidang Satgas

11	Supangat	Bidang Satgas
12	Puji Hartono	Bidang Humas
13	Abu Qodir	Bidang Humas
14	Pardi	Bidang Humas
15	Witono	Bidang Sarana dan Prasarana
16	Soedarno	Bidang Sarana dan Prasarana
17	Praminto	Bidang Sarana dan Prasarana

Desain kelembagaan yang terdapat di dalam Bojonegoro Kampung Pesilat sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang didapatkan penulis selama proses penggalan data, dimana beberapa narasumber menyatakan bahwa dalam proses kolaborasi ini mampu memberikan dampak yang positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

### 3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdaya dan melibatkan para pemangku kepentingan dan memobilisasi untuk kesuksesan kolaborasi. Konflik yang tinggi dan kepercayaan rendah memiliki intensif untuk berpartisipasi maka collaborative governance dapat melanjutkan layanan perantara antara stakeholder yang menerima layanan. Ketersediaan para pemimpin cenderung bergabung sesuai dengan keadaan setempat.

Implikasi kemungkinan kerjasama yang efektif mungkin terhambat oleh kurangnya kepemimpinan. Kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan oleh stakeholder, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar stakeholder dan stakeholder dan pembagian keuntungan bersama.

Kepemimpinan yang dilakukan oleh Paguyuban Bojonegoro Kampung Pesilat sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini didukung dari pernyataan yang dikemukakan oleh para narasumber yang mengungkapkan bahwa dari tingkat

Kabupaten sampai tingkat Kecamatan diikuti sertakan dalam kepengurusan BKP.

#### **4. Proses Kolaboratif**

Proses kolaboratif ini merupakan variable yang penting, dimana proses kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka yang berkaitan dengan kepercayaan yang baik, setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik maka akan terbangun suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi, setelah komitmen para stakeholder tinggi akan terjadi suatu pemahaman bersama dalam perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan misi yang jelas.

Setelah para stakeholder memiliki kesamaan dan kesepahaman, maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi.

Proses kolaborasi yang dilakukan oleh Paguyuban Bojonegoro Kampung Pesilat dalam setiap proses yang dilakukan melalui dialog tatap muka hingga hasil sementara, diperoleh hasil bahwa kolaborasi telah cukup baik dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan setiap aspek dalam proses kolaborasi telah terpenuhi misalnya dialog tatap muka melalui rapat koordinasi, pelaksanaan sosialisasi, patrol bersama.

Namun jika dikaitkan dengan kolaborasi Penta Helix, kolaborasi ini masih belum bisa mencapai titik optimal, karena belum terjalin kolaborasi peran pelaku usaha, dan akademisi.

### **KESIMPULAN**

#### **1. Kondisi Awal**

Kondisi awal yang meliputi alasan terbentuknya Bojonegoro Kampung Pesilat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta tujuan dan maksud dibentuknya Bojonegoro Kampung Pesilat sudah dapat dikatakan cukup baik jika dilihat jumlah angka konflik antar perguruan pencak silat yang setiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dari hasil

wawancara serta dokumentasi kegiatan yang diperoleh penulis bersama beberapa informan wawancara penelitian.

Namun jika dikaitkan dengan pendekatan kolaborasi Penta Helix, kerjasama yang dilakukan oleh Paguyuban Bojonegoro Kampung Pesilat masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Paguyuban Bojonegoro Kampung Pesilat belum membentuk suatu kolaborasi yang sempurna, karena belum melibatkan.

#### **2. Desain Kelembagaan**

Desain kelembagaan yang terdapat di dalam Bojonegoro Kampung Pesilat sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang didapatkan penulis selama proses penggalan data, dimana beberapa narasumber menyatakan bahwa dalam proses kolaborasi ini mampu memberikan dampak yang positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang terlibat dalam proses kolaborasi ini hanya dari Polres Bojonegoro, seluruh perguruan pencak silat, Media Massa, belum ada perwakilan para akademisi, serta pengusaha yang turut serta membantu dalam kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sehingga dari desain kelembagaan ini masih belum bisa dikatakan sebagai sebuah kolaborasi, karena belum mencakup unsur-unsur kolaborasi, khususnya dalam pendekatan Penta Helix.

#### **3. Kepemimpinan Fasilitatif**

Kepemimpinan adalah cara bagaimana seorang yang berkewenangan mampu memengaruhi anggotanya dalam mencapai sebuah tujuan. Kepemimpinan yang dilakukan oleh Paguyuban Bojonegoro Kampung Pesilat sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini didukung dari pernyataan yang dikemukakan oleh para narasumber yang mengungkapkan bahwa dari tingkat Kabupaten sampai tingkat

Kecamatan diikuti sertakan dalam kepengurusan BKP.

#### 4. Proses Kolaboratif

Proses kolaborasi yang dilakukan oleh Paguyuban Bojonegoro Kampung Pesilat dalam setiap proses yang dilakukan melalui dialog tatap muka hingga hasil sementara, diperoleh hasil bahwa kolaborasi telah cukup baik dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan setiap aspek dalam proses kolaborasi telah terpenuhi misalnya dialog tatap muka melalui rapat koordinasi, pelaksanaan sosialisasi, patrol bersama.

Namun jika dikaitkan dengan kolaborasi Penta Helix, kolaborasi ini masih belum bisa mencapai titik optimal, karena belum terjalin kolaborasi peran pelaku usaha, dan akademisi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

##### Buku-Buku :

- Ansell, Chris&Gash, Alison, *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, pp. 543-571, 2007
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Arikunto, S. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Penerbit BFEE UGM, Yogyakarta, 2002
- Gunawan, G.A. *Beladiri*, Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2007
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Erlangga, Jakarta, 2009

Lofland dan Lofland dikutip oleh Dr. Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2006

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, UIP, Jakarta, 1992

Notosoejitno, *Khazanah Pencak Sila*, Infomedika, Jakarta, 1997

PB. IPSI. *Pedoman Peraturan Pertandingan Pencak silat*, Hasil Munas IPSI XII 2007, Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

##### Jurnal :

- Anshar, M. Y. *Model Manajemen Badan Usaha Milik Desa Melalui Pendekatan Collaborative Governance Sebagai Modal Sosial Ekonomi Pembangunan Desa di Desa Pujon kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang), 2018
- Cahya, N. *Proses Collaborative Governance Dalam Penerapan Uang Elektronik (Unik) Di Jalan Tol Kota Makassar*.
- Faristiana, A. R. *Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Di Madiun (Studi Kasus Konflik dan Kekerasan Antara Perguruan Pencak Silat Setia Hati Terate dengan Setia Hati Tunas Muda Winongo di Madiun)* (Doctoral dissertation, Universit as Gadjah Mada), 2017
- Maksum, A. *Konflik kekerasan antar kelompok perguruan pencak silat: Proses pembentukan identitas sosial yang terdistorsi. Dalam "Anima", Indonesian Psychological Journal*, 24(2), 2009

- Prihatin, E., & Dwimawanti, I. H. Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 54-70, 2020
- Purnamasari, A. I. *MANAGEMEN KONFLIK PADA KOMUNITAS BOCAH JOGJA GAUL LIFESTYLE DI YOGYAKARTA* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta), 2019
- Wiranegara, I. M. J. Strategi Polres Madiun dalam manajemen konflik pencak silat. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(1), 41-48, 2020
- Widiyowati, E., Kriyantono, R., & Prasetyo, B. D. Model manajemen konflik berbasis kearifan lokal: konflik Perguruan Pencak Silat di Madiun–Jawa Timur. *Komunikator*, 10(1), 34-47, 2018
- Zakaria, M. Studi Tentang Konflik Antar Perguruan Silat Psht Dan Ikspi-Kera Sakti Di Desa Sumuragung Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 1-6, 2020

#### **Internet :**

- Alwi, Hasan.dkk. *Sejarah Perkembangan Pencak Silat*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2008
- Chang, Hyun Joo. *Collaborative Governance In Welfare Service Delivery : Focusing On Local Welfare in Korea*. International Review Of Public Administration, 2009
- Hadari Nawawi. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2005
- Seigler, D. *Renewing Democracy by Engaging Citizen in Shared Governance*. Public Administration Review, 2011

#### **Peraturan-Peraturan :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP
- Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Pasal 1 Ayat 3